



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERIKANAN

RENCANA KERJA TAHUN 2021

Jalan Antasari No.06 Telp / Fax. (0567) 21644
PUTUSSIBAU 78711

Website : www.diskan.kapuashulukab.go.id
Email : diskan@kapuashulukab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan " Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 "dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu serta Target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang dilaksanakan melalui SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, serta sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance*.

Terwujudnya *Good Governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan disusunnya RENJA ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.



Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 ini

Putussibau, 2020
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu,

RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si
NIP. 19650129 198603 1 009



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Perikanan secara umum merupakan bagian dari pembangunan Nasional, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Potensi sumber daya perikanan Kabupaten Kapuas Hulu cukup besar dengan beraneka jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Perairan umum atau yang lebih dikenal sebagai perairan pedalaman merupakan sumber daya perikanan yang sangat penting. Luas perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 450.257 ha atau 3,27% dari luas perairan umum Indonesia (13,3 juta ha) yang terdiri dari danau dan sungai, dimana terdapat 115 danau dengan luas lebih dari 120.000 ha termasuk kawasan danau serta rawa Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan potensial dengan beragam jenis sumberdaya perikanan yang terkandung didalamnya dimana memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya terutama dari produksi ikan air tawar.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.



RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun RKPD, acuan utama yang digunakan adalah arah dan program Pembangunan Daerah seperti yang dijabarkan dalam dokumen RPJM Daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik permasalahan daerah setempat serta berbagai program prioritas pembangunan. Disamping itu, RKPD dalam penyusunannya juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Propinsi/Nasional. Dengan tujuan merujuk dokumen perencanaan pada tingkat diatasnya dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Kabupaten, Propinsi dan Nasional.



Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan Perikanan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 tahun 2016 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD adalah sebagai dasar Dinas Perikanan dalam Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 mengacu Kepada, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor:25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
4. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri No. no. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.



1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disusun dengan maksud menyediakan acuan dalam menentukan pilihan-pilihan program kegiatan yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD serta segenap komponen dan lapisan masyarakat termasuk dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing SKPD bersipat sinergis dan koordinatif.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk memahami dan menilai arah kebijakan pembangunan selama periode satu tahun anggaran serta sebagai pedoman dalam menentukan arah, strategi maupun program prioritas kegiatan pembangunan baik sektoral maupun fungsional, secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Perikanan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
5. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan yaitu sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penyusunan
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Tahun lalu, Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, permasalahan dan hambatan tantangan maupun peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, perbandingan antara rancangan awal RKPD terhadap analisis hasil kebutuhan, kajian terhadap usulan program/kegiatan dari usulan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat , LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menggambarkan tentang Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD, Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, Uraian garis besar mengenai rekapitulasin jumlah program dan jumlah kegiatan.
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Berisi tentang strategi Kebijakan dan Rencana kerja serta pendanaan indikatif
- BAB V. PENUTUP, Berisi tentang Kesimpulan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaannya serta organisasi pelaksanaannya



Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2020
Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Urusan Kelautan dan Perikanan										
	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan										
	Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perairan budidaya dan perairan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	1. Produksi Perikanan:									
		a. Hasil perikanan budidaya (ton)	107.049	49.425,20	25.263	24.414,56	96,64	26.526	100.365,76	93,76	
		b. hasil perikanan tangkapan (ton)	133.236	71.854,01	41.100	41.050,42	99,88	24.700	137.604,42	103,28	
		c. Konsumsi Ikan (kg/kapita)	39,00	38,70	39	38	99,74	39,00	40,00	102,56	
		2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	50	59	48	55	114,58	50	30,00	60,00	
	PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN										



			1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah pengadaan benih dan pakan	3.85 juta benih dan 250 ton pakan	638.000 ekor untuk pakan 43 ton	700.000 benih dan 50 ton Pakan	-	0,00	-			
				Jumlah kelompok yang terbina	418 kelompok		165 kelompok	-	0,00	-			
			2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan										
			Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Ikan Hias dan Ikan Konsumsi Lokal	Kerjasama yang terjalin dengan Peneliti	9 Kerjasama	3 Kerjasama	3 kerjasama	-	0,00	-			
			Peningkatan sarana dan Prasarana BBI Kelansin	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	25 Paket	5 Paket	5 paket	-	0,00	-			
				Jumlah benih yang dihasilkan	2.750.000 ekor	100.000 ekor	120.000	-	0,00	-			
				Jumlah PAD dari sektor penjualan benih	Rp1.370.000.000	Rp120.000.000	Rp130.000.000	-	0,00	-			
			3. Pertemuan Teknis Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya yang meningkat Pengetahuannya	200 orang	48 orang	40 orang	-	0,00	-			
			4. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPR	Peningkatan Produksi benih ikan	500.000 ekor benih	130.000 ekor	100.000	-	0,00	-			
			5. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan Lingkungan	kegiatan yang di laksanakan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	-	0,00	-			
			6. Pembinaan CPIB dan CBIB	Sertifikasi Kelompok Pembudidaya ikan	5 Sertifikasi Kelompok	-	-	-	0,00	-			
			7. Pengelolaan Unit Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan Hias Endemik	Ikan Hias Endemik yang dibudidayakan	2 jenis	1 jenis	1 jenis	-	0,00	-			



				8. Pembinaan Mutu Pakan dan Obat-obatan	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilannya dalam Mutu Pakan dan Obat-obatan	30 kelompok	-	-	-	0,00	-				
				PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP											
				1. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	102.625 ton	31.494 ton	30.980 Ton	-	0,00	-				
				- Pengadaan Pukat Gilnet	Jumlah pengadaan pukat gilnet	3.000 unit	1.173 unit	700 unit	-	0,00	-				
				- Pengadaan Speed Rukun Nelayan	Jumlah pengadaan speedboat guna peningkatan pendapatan nelayan	40 Unit		10 unit	-	0,00	-				
				- Pengadaan Speed Rukun Nelayan BBG	Jumlah pengadaan speedboat guna peningkatan pendapatan nelayan	20 Unit		8 unit	-	0,00	-				
				- Pengadaan cool box	Jumlah Pengadaan coolbox	340 Unit		50 unit	-	0,00	-				
				- Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan	Jumlah balai pertemuan yang dibangun	1 Unit		-	-	0,00	-				
				2. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan											
				- Operasional dan Kegiatan TPI	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	7 TPI	7 TPI	7 TPI	7 TPI	100	-				
				- Pembangunan Lanting TPI	Jumlah Lanting TPI	1 Paket	1 paket	-	-	-	-				
					Jumlah PAD dari penarikan retribusi TPI		118.667.000	90.000.000	-	0,00	-				
				3. Pengembangan Statistik dan Informasi Perikanan Tangkap	Tersedianya Dokumen statistik perikanan tangkap	20 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	-	0,00	-				



				4. Pendataan Nelayan	Jumlah nelayan yang terdata	4500 orang		1.000 Orang	-	0,00	-			
				5. Pertemuan teknis rukun nelayan	Jumlah Nelayan yang mengikuti pertemuan	200 orang	-	40 Orang	-	0,00	-			
				PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										
				1. Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan dan penanganan pasca panen	Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan									
				- Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan mutu olahan	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana peningkatan mutu	67 Paket	3 paket	17 paket	-	0,00	-			
				- Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran	Jumlah sarana Pemasaran	16 Paket			-	0,00	-			
				2. Promosi hasil produksi unggulan daerah	Jumlah kegiatan promosi keluar	20 paket	2 paket	4 paket	-	0,00	-			
					Jumlah pengusaha yang menjalin kerjasama	10 pengusaha	-	3 Pengusaha	-	0,00	-			
				3. Pengawasan Mutu dan kapasitas produk pengolahan hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil yang terbina	53 kelompok	3 kelompok	8 kelompok	-	0,00	-			
				4. Pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan					-	0,00	-			
				- Pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil yang terbina	200 kelompok	10 kelompok	25 kelompok	-	0,00	-			
				- Magang studi banding dan pelatihan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Jumlah pengolah hasil yang diberangkatkan studi banding dan pelatihan	14 orang	2 orang	-	-	0,00	-			



				5. Pembinaan kelompok penerima PUMP Pengolah hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil yang terbina	50 kelompok	-	-	-	0,00	-				
				6. Pertemuan Teknis bagi kelompok pengolah hasil perikanan	jumlah kelompok yang mengikuti	200 kelompok	-	-	-	0,00	-				
				7. pengukuhan tim FORIKAN	pengurus yang dikukuhkan	4 pengurus	1 pengurus	2 pengurus	-	0,00	-				
				8. Pengawasan Mutu dan Kapasitas Produk Pengolahan Hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil	53 kelompok	4 kelompok	-	-	0,00	-				
				9. Pengembangan statistik dan informasi perikanan pengolahan hasil perikanan	data/ dokumen yang tersedia	20 dokumen	4 dokumen	-	-	0,00	-				
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR											
				1. Pengembangan Kawasan Budidaya	Jumlah KJA dan kolam masyarakat/ percontohan	160 unit	25 unit	34 unit	-	0,00	-				
				PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN											
				1. Pembinaan kelompok P2WKSS	Jumlah kelompok yang terbina	5 lokasi Pembinaan	1 lokasi/ tahun	1 lokasi/ tahun	-	0,00	-				
				2. Pekan Daerah	Partisipasi kegiatan	10 orang	4 Orang	2 Orang	-	0,00	-				
				3. Gelar Teknologi	Teknologi tepat guna	5 kegiatan	-	1 kegiatan	-	0,00	-				
				4. Pengembangan Statistik dan informasi kelembagaan kelompok perikanan	Data/ dokumen Kelompok Perikanan	20 Dokumen	-	-	-	0,00	-				



				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN									
				1. Pengelolaan sumber daya ikan									
				- cetak buku juknis ikan lokal	jumlah buku	180 buku	80 buku	-	-	0,00	-		
				- Co- management berbasis masyarakat	jumlah Desa Percontohan	9 desa	-	-	-	0,00	-		
				- Inventarisasi dan pendataan Danau Lindung	dokumen yang tersedia	1 dokumen	-	-	-	0,00	-		
				- Panen Ikan di Danau Lindung	kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	-	-	-	0,00	-		
				- Pembangunan prasarana di Danau lindung (lanting dan tenda permanent)	Terbangunnya lanting dan tenda permanen	2 paket	-	-	-	0,00	-		
				2. Pengawasan dan Pengendalian terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan	Operasional Pengawasan dan pengendalian	5 kegiatan	1 kegiatan	-	-	0,00	-		
				3. Penguatan kelembagaan kelompok pengawas	kemandirian kelompok pengawas	5 kegiatan	1 kegiatan	-	-	0,00	-		
				4. Penanggulangan aktivitas Ilegal Fishing di kabupaten Kapuas Hulu	semakin berkurangnya aktivitas ilegal fishing	80%	40%	-	-	0,00	-		
				5. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengawasan									
				- Pengadaan Speed Pengawas 40 PK	tersedianya Speedboat	1 unit		-	-	0,00	-		
				- Pembangunan Pos Pengawasan	Terbangunnya Pos Pengawasan	2 unit	1 Unit	-	-	0,00	-		
				- Pembangunan Shelter pos Pengawas	Terbangunnya shelter pos pengawasan	1 unit	1 Unit	-	-	0,00	-		
				- Pos Pengawasan Danau Lindung	Terbangunnya Pos Pengawasan	2 unit		-	-	0,00	-		



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021

				- Pendopo Danau Lindung Entibab	Terbangunnya Pos Pengawasan	2 unit	1 Unit	-	-	0,00	-			
				- Pendopo Danau Lindung Bagut	Terbangunnya Pos Pengawasan	1 unit		-	-	0,00	-			
				- Pengadaan Sarana Public Awareness Campaign Pengawasan Perairan Umum Kab. KH.	tersedianya sarana Public Awareness Campaign	1 paket		-	-	0,00	-			
				- Pengadaan Perlengkapan Pokmaswas	tersedianya perlengkapan pengawas	2 unit		-	-	0,00	-			



Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2020 di atas dapat kita lihat bahwa hampir semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Namun ada beberapa program tidak dapat secara maksimal terealisasi, Keterbatasan dan kendala teknis mengakibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat secara maksimal melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

Beberapa kendala dan hambatan serta permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tahun lalu, diantaranya yakni:

2. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil

- Masih banyaknya Penangkapan ikan yang cenderung tidak ramah lingkungan yaitu menggunakan alat-alat tangkap yang dilarang
- Gejala tangkap yang berlebihan (Over Fishing)
- Kerusakan Sumber Daya Ikan (SDI)
- Masih adanya pelanggaran yang belum tertangani secara tuntas terhadap kejadian di perairan umum
- Belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

3. Perikanan Budidaya

- Ketersediaan benih baik secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung UPR
- Kemampuan SDM Masyarakat pembudidaya masih terbatas
- Terbatasnya akses permodalan
- Minimnya jumlah sarana budidaya (Kolam/Keramba)
- Luasnya wilayah binaan, beratnya medan lokasi budidaya



Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kapuas Hulu secara umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, yang meliputi :

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2021 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017-2021.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:



Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan			B	BB	-	-	0	0	0	0	
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			103	104	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)			100	101	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Nilai Tukar Pengolah Ikan (NTPe)			105	106	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Harga jual ikan segar, beku dan produk olahan ditingkat konsumen stabil (tidak melebihi angka inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank BI)			2,88	2,88	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Angka pasokan ikan (%)			3	5	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Persentase Nelayan yang Meningkatkan Pendapatannya (%)			8,5	5	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	



8	Persentase Pembudidaya yang Meningkatkan Pendapatannya (%)			10	6	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Persentase Pengolah yang Meningkatkan Pendapatannya (%)			3	2	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
10	Realisasi nilai bobot unsur-unsur pemenuhan formalitas dokumen yang dicapai			-	-	14,88	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
11	Realisasi nilai bobot unsur-unsur kualitas subtransi instrumen akuntabilitas kinerja yang dicapai			-	-	29,03	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
12	Realisasi nilai bobot unsur-unsur penerapan /pemanfaatan instrumen yang dicapai			-	-	12,81	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
13	Pencapaian sasaran/kinerja organisasi			-	-	14,78	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
14	Produksi ikan tangkap dalam ton per tahun			-	-	25.935	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
15	Jumlah produksi budidaya (Ton)			-	-	27.852	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
16	Jumlah Hasil produksi ikan olahan (Ton)			-	-	11.370	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
17	Ragam Jenis Produk Olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)			-	-	5	-	n/a	n/a	n/a	n/a	



Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan perencanaan kinerja serta strategis membutuhkan suatu gambaran tentang berbagai kondisi daerah. Informasi yang jelas tersebut akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa faktor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan faktor-faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang atau tantangan.

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor perikanan ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan, khususnya pada sektor perikanan.



Guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

a. Isu strategis tingkat OPD:

- 1) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- 2) Rendahnya pendapatan nelayan tangkap disektor Hulu.
- 3) Rendahnya pendapatan pembudidaya disektor Hulu.
- 4) Rendahnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan disektor Hilir (Pengumpul, distributor, Jasa Angkutan/Logistik ikan, Pengolah/Pedagang ikan dan Pengolah Hasil Perikanan.

b. Isu strategis tingkat Bidang:

- 1) Rendahnya kontribusi UPR /Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas,
- 2) Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas,
- 3) Berkurang bahkan menghilangnya beberapa Jenis ikan Endemik Kualitas ekspor dan atau bernilai ekonomi Tinggi.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 yang kemudian dituangkan dalam bentuk strategi pembangunan nasional yang kemudian terkait dengan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

Agenda/Nawa Cita ke-6:

Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan;
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan; dan
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah;
3. Meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan.

Sedangkan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola Dinas Perikanan yang baik;
2. Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah;



3. Meningkatnya pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan harga terjangkau di tingkat konsumen dan pengolah

3.3 Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam Rencana Kerja 2020 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di Tahun 2021 adalah:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - i. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - ii. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - iii. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah
 - i. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - ii. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - iii. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - i. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - ii. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - i. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - ii. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - iii. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
 - iv. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - d) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
 - e) Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota
 - a) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota



- b) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- 1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - a) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - a) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan Prioritas tersebut diatas tentunya harus dapat terukur melalui indikator-indikator capaian kinerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan tersebut guna menunjukkan seberapa berhasil Program dan kegiatan prioritas tersebut dalam mencapai target yang ditentukan, Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta Indikator capaian Kinerja dan Pendanaan Dinas Perikanan di Tahun 2021 serta Perkiraan Maju Rencana dinas Perikanan Tahun 2022 tergambar dalam tabel T-C.33 berikut ini



Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu**

OPD : Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aksi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aksi	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				17.086.121.088				17.086.121.088
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Angka capaian rata-rata dari evaluasi SAKIP indek kepuasan pelanggan dan masyarakat, evaluasi laporan keuangan		90%	6.640.989.270			90%	6.640.989.270
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Dinas Perikanan	100%	164.441.800	APBD II		100%	164.441.800
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana dan penetapan Kinerja Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	3 Dokumen	24.345.000	APBD II		3 Dokumen	24.345.000



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021

3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	1 Dokumen	3.900.000	APBD II		1 Dokumen	3.900.000
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	1 Dokumen	3.960.000	APBD II		1 Dokumen	3.960.000
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Perubahan Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	1 Dokumen	3.800.000	APBD II		1 Dokumen	3.800.000
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	1 Dokumen	3.680.000	APBD II		1 Dokumen	3.680.000
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi paket pekerjaan/pengadaan yang terpantau secara langsung (Monev) dan pelaporan hasil Monev	Dinas Perikanan	40%	124.756.800	APBD II		60%	124.756.800
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	4 Dokumen				4 Dokumen	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian laporan keuangan yang dikelola		100%	4.123.737.788			100%	4.123.737.788
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah honorarium tenaga pendukung yang tersedia dalam 1 Tahun	Dinas Perikanan	100%	3.602.758.788	APBD II		12 Bulan	3.602.758.788



3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Jumlah Kontrak yang tersedia dalam satu tahun	Dinas Perikanan	50%	491.489.000	APBD II		50%	491.489.000
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan yang dibuat tepat waktu	Dinas Perikanan	1 Dokumen	7.060.000	APBD II		1 Dokumen	7.060.000
3	25	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase tanggapan pemeriksaan yang terpenuhi	Dinas Perikanan	50%	6.370.000	APBD II		50%	6.370.000
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semester	Dinas Perikanan	2 Dokumen	16.060.000	APBD II		2 Dokumen	16.060.000
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Aset BMD yang terdata dan dikelola	Dinas Perikanan	100%	26.955.000			100%	26.955.000
3	25	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase BMD yang dibina dan diawasi	Dinas Perikanan	80%	9.700.000	APBD II		80%	9.700.000
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah KIB yang tercetak	Dinas Perikanan	1 Dokumen	17.255.000	APBD II		1 Dokumen	17.255.000
3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Dinas Perikanan		5.300.000				5.300.000
3	25	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pendapatan Daerah yang dikelola	Dinas Perikanan	80%	5.300.000	APBD II		80%	5.300.000



3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	Dinas Perikanan	90%	57.305.000			90%	57.305.000
3	25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata bobot nilai perumusan ketersediaan yang dapat dicapai pada semua produk layanan kepegawaian	Dinas Perikanan	80	15.705.000	APBD II		80	15.705.000
3	25	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (PSTKP SKP) yang tersusun	Dinas Perikanan	30 Naskah	32.850.000	APBD II		30 Naskah	32.850.000
						Persentase capaian penyelenggaraan RB di Dinas	Dinas Perikanan	80%		APBD II		80%	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti/pendampingan kegiatan magang dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi nya	Dinas Perikanan	5 Orang	8.750.000	APBD II		5 Orang	8.750.000
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		78,65%	122.175.000			78,65%	122.175.000
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan tiap bulan (rekening)	Dinas Perikanan	12 Bulan	18.090.000	APBD II		12 Bulan	18.090.000



3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor dalam 1 tahun	Dinas Perikanan	12 Bulan	2.520.000	APBD II		12 Bulan	2.520.000
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Kartu Ucapan Hari raya, Spanduk, Umbul-umbul dan biaya fotocopy dan penjiliditan yang disediakan	Dinas Perikanan	100%	1.500.000	APBD II		100%	1.500.000
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar, Tabloid dan majalah (Bulan)	Dinas Perikanan	12 Bulan	7.814.000	APBD II		12 Bulan	7.814.000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Dinas Perikanan	10 Kali	92.251.000	APBD II		10 Kali	92.251.000
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan yang diadakan		100%	149.317.982			100%	149.317.982
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ragam jenis peralatan dan mesin yang disediakan	Dinas Perikanan	4 Jenis	149.317.982	APBD II		4 Jenis	149.317.982
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor yang disediakan		100%	1.890.556.700			100%	1.890.556.700
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang dikirim	Dinas Perikanan	70 Surat	3.500.000	APBD II		70 Surat	3.500.000



3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor 1 Tahun	Dinas Perikanan	100%	151.400.000	APBD II		100%	151.400.000
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kebutuhan OPD	Dinas Perikanan	100%	22.429.000	APBD II		100%	22.429.000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Publik mendapatkan Nilai 80-100(Zona Hijau)	Dinas Perikanan	90	1.713.227.700	APBD II		90	1.713.227.700
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		50%	101.200.000			50%	101.200.000
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase belanja operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional	Dinas Perikanan	100%	101.200.000	APBD II		100%	101.200.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun	Kab.Kapuas Hulu	30Kg/Ha/Tahun	1.177.026.919			30Kg/Ha/Tahun	1.177.026.919
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)	Jumlah produksi ikan tangkap pada perairan yang dikelola sistem CBF (dalam ton/tahun) dan atau Danau Lindung			996.309.919				996.309.919



					Daerah Kabupaten/ Kota								
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data perikanan tangkap yang terfivikasi	Kab.Kapuas Hulu	1 Dokumen	79.879.000	APBD II		1 Dokumen	79.879.000
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap pada perairan yang dikelola sistem CBF (dalam ton/tahun) dan atau Danau Lindung	Danau Lindung/Danau Lindung adat di PUD Kab.Kapuas Hulu	7 Ton	38.421.919	APBD II		7 Ton	38.421.919
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah ragam jenis sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Semtau,Bunut Hilir,Embaloh Hilir,Embaloh Hulu, Jongkong dan Selimbau	7 Jenis	878.009.000	APBN/APBD II		1 Jenis	878.009.000
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Angka partisipasi nelayan pesisir pada wilayah ekosistem yang menjadi lokus pemberdayaan ekonomi	Madang Permai Suhaid	1	74.584.000			1	74.584.000



3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah ibu rumah tangga nelayan kecil yang memiliki kemampuan dalam mengolah dan memanfaatkan produk perikanan	Madang Permai Suhaid	30	62.964.000	APBD II		30	62.964.000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB yang terfasilitasi	Vega dan Embaloh Hulu	10	5.620.000	APBD II		10	5.620.000
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan yang difasilitasi untuk mendapatkan Asuransi Nelayan	Kabupaten Kapuas Hulu / Pontianak	100	6.000.000	APBD II		100	6.000.000
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Retribusi perikanan dalam jutaan	7 TPI	Rp 80.000.000	106.133.000	APBD II		Rp 85.000.000	106.133.000
3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah ikan yang di bongkar muat pada TPI per bulan dalam Ton	7 TPI	650 Ton	106.133.000	APBD II		750 ton	106.133.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi budidaya (Ton pertahun)		28.831, 25 Ton	8.413.160.599			30.152, 25 Ton	8.413.160.599
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah benih yang diproduksi dalam ekor/tahun		500.377 ekor	596.219.000			550.000 Ekor	596.219.000



						Jumlah benih yang produksi dalam jenis/macam pertahun		7 Jenis				7 Jenis	
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Presentase realisasi penyaluran bantuan yang dapat disalurkan dibandingkan target (%)	Kapuas Hulu Tersebar	100%	562.626.000	APBD II		100%	562.626.000
						Jumlah produksi ikan pada sektor kemitraan		3 ton				1 ton	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Ragam jenis pelatihan budidaya air tawar	Nanga Tepuai (Hulu Gurung) dan Pinang Laka (Pengkada n)	2 Jenis	33.593.000	APBD II		2 Jenis	33.593.000
						Jumlah orang pelatihan (orang)		15 Orang				15 Orang	
						Ragam jenis pelatihan budidaya air tawar pada UPT Benih Ikan Kelansin	UPT-BI Kelansin	3 Jenis				3 Jenis	
						Jumlah orang pelatihan pada UPT Benih Ikan Kelansin (orang)	UPT-BI Kelansin	4 Orang				4 Orang	



3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya air tawar (kolam, keramba/KJA, Minapadi dan kawasan terpadu)		28.831,2 5 ton	7.816.941.599			30.152,2 5 ton	7.816.941.599
						Jumlah produksi benih ikan UPT BI (dalam ekor)		450.000 ekor				500.000 ekor	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data perikanan budidaya yang terfervikasi	Kec. Selimbau, Kec. Jongkong, Kec. Bunut Hilir, Kec. Hulu Gurung, Kec. Pengkadan , Kec. Bunut Hulu, Kec. Badau, Kec. Batang Lupar	2 Dokumen	45.315.000	APBD II		2 Dokumen	45.315.000



3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana kolam pembudidayaan yang dibangun		15 unit	1.100.440.000	APBD II/APBN		15 unit	1.100.440.000
						Jumlah unit Kermaba Apung pembudidayaan yang dibangun	230 unit Kec. Selimbau, Suhaid, Semitau, Jongkong, Bunut Hilir dan Embaloh Hilir	20 unit				20 unit	
						Luas Budidaya Minapadi yang dibangun	Kec. Hulu Gurung, Bunut Hulu, Empanang, Mentebag, Boyan Tanjung, Batang Lupa, Putussibau Selatan	2 ha				2 ha	
						Jumlah unit sarana UPT BI yang dibangun	UPT-BI Kelansin	8 Unit				8 Unit	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih yang disediakan dalam ekor/tahun		420.000 ekor	6.618.194.599	APBD II/APBN		440.000 ekor	6.618.194.599
						Retribusi hasil penjualan benih (PAD) yang disetor		Rp 150.000.000				Rp 150.000.000	



3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah dan ragam jenis penyakit ikan pada usaha budidaya (kasus)	Kec. Putussibau Selatan, Batang Lupar, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Pengkadan, Puring Kencana, Empanang, Sejiram, Jongkong, Silat Hilir	3 Kasus	31.292.000	APBD II		3 Kasus	31.292.000
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina	Kec. Putussibau Selatan, Batang Lupar, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Pengkadan, Puring Kencana, Empanang, Sejiram, Jongkong, Silat Hilir	10 Pokdakan /UPR	21.700.000	APBD II		10 Pokdakan /UPR	21.700.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik	Danau	2	10.550.000			2	10.550.000



3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Pokmaswas yang terbentuk	Pulau Majang dan Vega	2	10.550.000			3	10.550.000
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pokmaswas yang terbina	Kab.Kapu as Hulu	2 Pokmaswas	5.950.000	APBD II		2 Pokmaswas	5.950.000
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau dan lainnya yang terawasi	Kab.Kapu as Hulu (DAS)	10 Pembudi daya	4.600.000	APBD II		10 Pembudi daya	4.600.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)	Kabupaten Kapuas Hulu	6 Jenis	844.394.300			7 Jenis	844.394.300
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolah yang terdata	Kabupaten Kapuas Hulu	10%	40.002.500	APBD II		15%	40.002.500



3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data pengolahan perikanan yang terfivikasi	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	40.002.500	APBD II		1 Dokumen	40.002.500
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolahan yang eksis berdiri baru sebagai kelompok pemula	Kabupaten Kapuas Hulu	2 kelompok	44.152.000	APBD II		3 kelompok	44.152.000
						Jumlah kelompok pengolahan yang berkembang dari kelompok pemula menjadi kelompok mikro	Kabupaten Kapuas Hulu	1 kelompok		APBD II		2 kelompok	
						Jumlah kelompok mikro yang berkembang dari kelompok mikro menjadi kelompok usaha kecil	Kabupaten Kapuas Hulu	0 kelompok				0 kelompok	
						Jumlah ragam/jenis produk di pasar tradisional (jenis)	Kabupaten Kapuas Hulu	4 jenis		APBD II		5 jenis	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah orang lulus terlatih pelatihan hasil pengolahan perikanan	Kabupaten kapuas hulu	10 Orang	44.152.000	APBD II		15 orang	44.152.000
						Ragam jenis kompetensi/ keahlian yang dikuasai peserta lulus pelatihan	Kabupaten kapuas hulu	6 jenis		APBD II		7 jenis	



3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka pasokan ikan (%)	Kabupaten kapuas hulu	6%	760.239.800	APBD II		7%	760.239.800
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka capaian pembangunan sistem logistik ikan daerah	Kabupaten kapuas hulu	3	50.122.000	APBD II		3	50.122.000
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk mendapatkan bantuan	Kabupaten kapuas hulu	5 kelompok	710.117.800	APBD II		5 kelompok	710.117.800



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan Kinerja. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup penentuan kebijakan program, dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakat pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan sektor perikanan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2021 Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

Strategi yang ada pada Dinas Perikanan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah khususnya pembangunan sektor perikanan. Maka dari itu strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dimuat dalam Tabel 4.1 dibawah ini :



VISI		: MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS		
MISI		: MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN		
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola Dinas Perikanan yang baik	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan, sarana dan prasarana, penyusunan perencanaan dan evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pengaduan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah 4. Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan terbaru 5. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif 6. Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi 7. Menyediakan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai 8. Melakukan pengukuran kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat secara berkala
2	Meningkatkan kesejahteraan nelayan	Meningkatnya produksi ikan tangkap	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan potensi/stok ikan tangkap di PUD 2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk pemulihan sumber daya ikan 3. Meningkatkan partisipasi kelembagaan nelayan dalam pembangunan perikanan 4. Meningkatkan kualitas pemukiman nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk mendukung upaya pengelolaan perikanan 5. Meningkatkan produksi ikan tangkap pada perairan berbasis CBF 6. Menghentikan sementara secara bertahap mengenai cara penangkapan dan budidaya yang tidak lestari, sehingga populasi ikan meningkat
4	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sarana faktor- faktor produksi perikanan budidaya masyarakat 2. Meningkatkan keterampilan pembudidaya 3. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya terpadu 4. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya berbasis CBF 5. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya miinapadi 6. Meningkatnya produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya kemitraan, lintas sektor (Kampung KB, P2WKSS/BBGR, Pemerintah Desa 7. Meningkatkan pengawasan Perikanan Budidaya yang meliputi peredaran pakan dan obat-obatan serta kesehatan lingkungan 8. Mengidentifikasi, terinvestigasi dan tersusunnya proposal perbaikan atas kasus penurunan produktivitas budidaya tertentu



5	Meningkatnya kesejahteraan pengolah	Meningkatnya ragam jenis produk yang dapat di produksi unit pengolah hasil perikanan dan omzet penjualan produk	Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan ketersediaan calon instruktur sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan, ketersediaan modul ajar dan prasarana/sarana/ peralatan penunjang pelatihan dan pelaksana yang berpengalaman dalam mengelola pelatihan 2. Meningkatkan keterampilan pekerja pengolah hasil perikanan dalam membuat produk 3. Meningkatkan kemampuan pengolah hasil perikanan dalam mengelola usaha 4. Meningkatkan kemandirian kelompok pengolah dalam mengolah usaha 5. Meningkatkan ragam jenis dan nilai produk yang dapat di pasarkan oleh kelompok pengolah 6. Meningkatkan mutu produk perikanan
6	Meningkatkan kontribusi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan Pemerintah	Meningkatnya produksi benih dan pakan unit pembenihan rakyat (UPR/UP2R) dan Pembudidaya	Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bantuan prasarana/sarana produksi benih untuk UPR dan Pokdakan 2. Meningkatkan keterampilan UPR dan Pokdakan dalam produksi benih dan pakan
7	Meningkatkan kontribusi BBI Dinas dalam penyediaan kebutuhan bibit untuk Masyarakat dan Pemerintah	Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di Balai Benih	Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan (BI) Kelansin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi bibit dan intensitas inspeksi mutu produksi benih 2. Meningkatkan ragam/jenis ikan, pakan yang diuji coba/ produksi, pelayanan diagnosa penyakit/ penjabatan penyakit ikan dan pengamatan kualitas air 3. Melaksanakan pembangunan/ pengadaan baru atau peningkatan prasarana/sarana Balai Benih Ikan Kelansin 4. Tidak berkurang debit air masuk ke instalasi minimal 3 tahun ini, dan meningkatnya debit air masuk sekurang - kurangnya 3 tahun dari saat ini
8	Meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan	Meningkatkan pasokan ikan berkualitas sesuai kebutuhan	Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras sistem logistik ikan di koridor I,II dan III secara bertahap 2. Melaksanakan monitoring, evaluasi, investigasi pelaksanaan SLID 3. Melaksanakan pelayanan bongkar muat, pelelangan ikan, penarikan retribusi perikanan dan laporan data perikanan yang masuk pelabuhan semakin baik 4. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan baik baru atau peningkatan (rehabilitasi) sesuai dengan RUP yang telah ditetapkan
9	Mencegah berkurangnya keberagaman ikan endemik/ berpotensi langka dari kepunahan dan meningkatkan potensi ikan di PUD	Meningkatnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik	Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ragam/jenis dan jumlah populasi masing - masing jenis ikan endemik pada pusat penangkaran 2. Memfasilitasi pembentukan dan rapat - rapat instalasi lintas sektor (Pokja) untuk merumuskan suatu kebijakan terkait upaya penyelamatan danau yang dilakukan secara bersama - sama 3. Melaksanakan penyusunan draf peraturan - peraturan daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan di perairan umum daratan 4. Meningkatkan peranserta POKMASWAS dan aparat penegak hukum tindak pidana perikanan dan lingkungan



Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Perikanan kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 ini disusun dalam rangka menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pada akhirnya tercapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang mendasar adalah adanya integritas antara Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam satu keterpaduan gerak langkah operasional pembangunan perikanan guna mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dengan beraneka jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Perairan Umum atau yang lebih dikenal sebagai perairan pedalaman merupakan sumber daya perikanan yang sangat bernilai ekonomis tinggi. Luas perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 450.257 ha yang terdiri dari danau dan sungai, dimana terdapat 115 danau dengan luas lebih dari 120.000 ha termasuk kawasan danau serta rawa Taman Nasional Danau Sentarum. Dari aspek ekonomi, kawasan Danau Sentarum dan sekitarnya memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya, terutama dari produksi ikan air tawar. Berkaitan dengan hal tersebut Untuk itu, Dinas Perikanan telah berupaya menyusun program perikanan, yang orientasinya tidak saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya dan Pengolah Hasil Perikanan, tetapi juga mampu mengelola sumber daya tersebut secara bertanggungjawab sehingga dapat menjaga keseimbangan dan kelestariannya.

Mengacu kepada filosofi dari pembangunan itu sendiri, disadari bahwa pembangunan perikanan merupakan proses terus-menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Lebih dari itu, merupakan komitmen dan keyakinan kita, bahwa pembangunan perikanan juga



merupakan upaya bersama baik itu Pemerintah, DPRD dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, pembangunan perikanan akan lebih berhasil apabila terjadi keterpaduan dan kerjasama seluruh stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perikanan. Tidak saja keterpaduan intra-instansi serta keterpaduan antar sektor dan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga keterpaduan dan dukungan penuh dari pihak lainnya, baik swasta, LSM, maupun masyarakat luas.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2020 ini dapat memberi manfaat dalam pembangunan sektor Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik dan berkelanjutan.

Putussibau, 2020
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu,

RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si
NIP. 19650129 198603 1 009